
ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA MENURUT EKONOMI ISLAM

Suci Diana Wulansari ¹, Bunga Ayufi Rachmaniyah ², Krisna Reswara ³, Renny Oktavia ⁴

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur, Indonesia

Correspondence author: renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id ^{1,2,3,4}

Abstrak

Kebijakan Fiskal dan Moneter merupakan suatu kebijakan yang berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi makro. Kedua kebijakan ini harus saling berdampingan dan kontributif supaya pertumbuhan ekonomi dapat sesuai dengan harapan. Dalam penelitian ini peneliti akan fokus membahas terkait perkembangan ekonomi Islam dalam kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk perekonomian Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini melibatkan penyajian data interpretasi berupa artikel dari sejumlah referensi. Sesuai dengan hasil menyatakan bahwa kebijakan fiskal dan moneter dikatakan dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan ekonomi makro. Dalam hal ini, penetapannya tentu memberikan dampak untuk mencapai perbaikan perekonomian.

Kata kunci : Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, Ekonomi Islam

Abstract

Fiscal and Monetary Policy Analysis of the Indonesian Economy according to Islamic Economics. Fiscal and Monetary Policy is a policy that influences macroeconomic policy. These two policies must be side by side and contributive so that economic growth can be in line with expectations. In this research, researchers will focus on discussing the development of Islamic economics in fiscal policy and monetary policy for the Indonesian economy. The research method used is library research with descriptive analysis. This descriptive analysis method involves presenting interpretive data in the form of articles from a number of references. In accordance with the results, it is said that fiscal and monetary policy can have an influence on macroeconomic policy. In this case, its determination will certainly have an impact on achieving economic improvement.

Keywords : *Fiscal Policy, Monetary Policy, Islamic Economics*

1. Pendahuluan

Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa terpisah dari aktivitas ekonomi. Ekonomi merupakan pondasi utama yang paling penting untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai badan tertinggi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas vital sebuah negara. Pada konsep islam tugas utama pemerintah dalam perekonomian salah satunya ialah menciptakan dan menjaga stabilitas ekonomi

baik dalam tingkatan kecil ataupun besar. Untuk mencapai stabilitas ini, pemerintah mengambil kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk mengadakan perubahan pada sistem pajak atau pembiayaan yang memiliki tujuan untuk melewati adanya permasalahan ekonomi yang dialami (Pranika, R, Fahrozi, A, Mahfud, AH, & ... , 2023). Kebijakan fiskal yang pemerintah lakukan yaitu dengan memerintah menteri keuangan untuk membiayai keperluan negara menggunakan Anggaran belanja negara (APBN) yang diterima dari pajak dan pembangunan negara (Rahma, TIF, & Nurbaiti, N, 2021). Dalam islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan guna mencapai tujuan syariah. Yang dimana memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan tetap menjaga iman, intelektual, aktiva, aset, dan aktivitas. Kebijakan fiskal memiliki perhatian serius untuk memperbaiki perekonomian mulai awal (I Aini, 2019). Dapat dipahami bahwa kebijakan fiskal dari pandangan islam maupun konvensional memiliki kesamaan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam segi ekonomi.

Kebijakan Moneter merupakan perangkat kebijakan ekonomi di bidang makro yang dipegang oleh suatu Bank melalui implementasi atas penawaran uang, pengkreditan, tingkat suku bunga, dan pengeluaran dalam perekonomian (Handoko, DO, Putra, PA, Ismail, R, & ... , 2023). Perlu diketahui, jika dalam ekonomi islam menekankan larangan adanya praktik riba. Riba sendiri memiliki arti melebihkan suatu nominal uang yang dipinjamkan. Oleh karena itu, kebijakan moneter dalam pandangan islam dapat diartikan sebagai semua kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan uang atau modal yang digunakan sebagai pondasi aktivitas riil yaitu baik dari sisi permintaan maupun penawaran (I Turmudi, 2019).

Kebijakan Fiskal dan Moneter merupakan suatu kebijakan yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan macro economy. Tingkat ekonomi dirasa dapat membaik apabila menetapkan adanya kebijaka macro economy. Kedua kebijakan ini harus saling berdampingan dan kontributif supaya pertumbuhan ekonomi dapat sesuai dengan harapan Agar pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang diharapkan, karena jika kedua kebijakan ini tidak dalam satu arah maka pertumbuhan ekonomi tentu tidak dapat berjalan dengan baik atau dapat mencapai nol. Oleh karena itu, perlu adanya hubungan baik antara kebijakan Fiskal dengan kebijakan Moneter (Handoko, DO, Putra, PA, Ismail, R, & ... , 2023).

2. Kajian Pustaka

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tri Inda Fadhila Rahma dan Nurbaiti (2021) dalam konteks ekonomi Islam, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran anggaran negara diarahkan melalui kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Peran pemerintah dalam mengelola anggaran negara dianggap penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam pandangan Imam Turmudi (2019), kebijakan moneter dianggap sebagai upaya untuk mengendalikan ekonomi makro agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam konteks Islam, terdapat instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur ekonomi makro, seperti penggunaan profit rate sebagai alternatif pengganti suku bunga, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Menurut Dodi Okri Handoko, Popi Adiyes Putra, Rifki Ismail, dan Andri Soemitra (2023), kebijakan moneter dan fiskal merupakan faktor yang mempengaruhi ekonomi makro. Kedua kebijakan ini harus saling mendukung untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Penting bagi kedua lembaga pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, untuk bersinergi dalam menetapkan kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perkembangan ekonomi Islam dalam kebijakan keuangan dan moneter bagi perekonomian Indonesia. Dalam penelitian menggunakan penelitian kepustakaan yang dimana dengan analisis deskriptif. Tujuan penelitian kepustakaan adalah melakukan penelitian berdasarkan pengumpulan data dari sumber tekstual seperti buku, jurnal, dan bahan referensi lainnya. Metode analisis deskriptif ini melibatkan penyajian data interpretasi berupa artikel dari sejumlah referensi. Subjek penelitian ini adalah kebijakan fiskal dan moneter yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019-2023. Data tersebut diperoleh dari portal data APBN yang diatur oleh Direktorat penyusun APBN dan dilanjut dengan membandingkan teori ekonomi syariah yang diambil dari beberapa dokumen.

4. Hasil dan Pembahasan

Pada kebijakan fiskal tahun 2023 yang dilakukan oleh kementerian keuangan adalah fokus pada tingkat produktivitas guna perubahan ekonomi yang menyeluruh dan konstan. Tema yang diangkat pada kebijakan fiskal tahun ini adalah strategi yang diambil oleh pemerintah dan bertujuan untuk memfokuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2023 ini lebih dioptimalkan,

Sebagai Shock Absorber Optimalisasi Pengeluaran:

1. Mengawasi tingkat inflasi dan daya beli masyarakat.
2. Menjaga momentum pemulihan.
3. Mempertahankan prioritas belanja.

Momentum Penguatan Ketahanan Fiskal:

1. Menyiapkan buffer dalam mencegah keraguan.
2. Mempertahankan pondasi konsolidasi dan perkembangan fiskal.

Keunggulan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 akan ditopang oleh permintaan domestik di tengah ketidakpastian kinerja

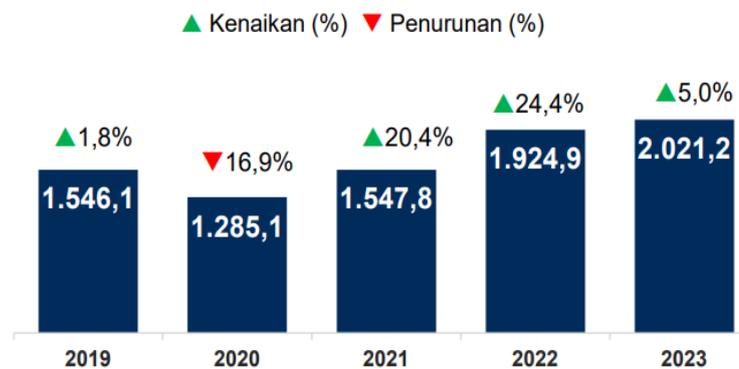
perekonomian global. Menurut APBN Tahun 2023 diutamakan pada tingkat produktivitas untuk perubahan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah mengupayakan untuk memaksimalkan pertahanan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan produktivitas dengan berbagai cara. Pertama tetap menjalankan penguatan reformasi struktural melalui peningkatan SDM dan infrastruktur, kedua perubahan anggaran untuk belanja yang berkualitas dan efisien, ketiga akselerasi ekonomi guna mewujudkan efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2023, keempat reformasi struktural akan terus berlanjut dengan didukung oleh reformasi fiskal yang komprehensif dan tetap mengoptimalkan pendapatan sektor pemerintah, kelima menguatkan kualitas dan efisiensi belanja negara serta keberlanjutan pembiayaan anggaran.

Tabel 01. APBN Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2023

Uraian (Milyar Rupiah)	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Negara	1.960.641,00	1.647.783,30	2.011.347,10	2.635.843,00	2.463.000,00
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,00	1.285.136,30	1.547.841,10	2.034.552,40	2.021,200,00
Penerimaan Negara Bukan Pajak	409.000,00	343.814,20	458.493,00	595.594,60	441.400,00
Hibah	5.500,00	18.832,80	5.013,00	5.696,10	4.000,00
Belanja Negara	1.496.313,90	1.832.950,90	2.000.703,80	2.280.027,90	3.061.000,00
Belanja Pemerintah Pusat	1.496.313,90	1.832.950,90	2.000.703,80	2.280.027	2.246.500,00
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	812.973,40	762.530,20	785.707,60	816.234,80	814.700,00
Keseimbangan Primer	- 73.125,10	- 633.609,70	- 431.568,90	- 742.157,00	92.200,00
Defisit Anggaran	- 348.646,30	- 947.697,80	- 775.064,30	355.815,20	598.200,00
Pembiayaan Anggaran	402.051,50	1.193.293,80	871.723,20	590.978,10	589.200,00

Berdasarkan tabel Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara tahun 2023 diatas bahwa setiap tahunnya dengan mengikuti peningkatan jumlah penerimaan negara. Hal tersebut dapat dilihat bahwa belanja negara lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pendapatan. Akan tetapi, defisit anggaran menurun setiap tahunnya jadi pemerintah mengupayakan untuk mengurangi jumlah defisit anggaran. Pengelolaan keuangan anggaran pemerintah yang berada pada posisi defisit primer, ketika negara mengalami defisit maka negara tersebut mengambil langkah untuk pembiayaan anggaran dalam mengimbangi pengeluaran pemerintah.

Tabel 02. Penerimaan Pajak tahun 2019 – 2023



Berdasarkan tabel APBN dan grafik batang diatas, penerimaan pajak tersebut terlihat bahwa pengeluaran negara mengalami kenaikan, sehingga kebijakan negara yang diambil bertentangan dengan teori keynes tentang, apabila pembebanan pajak mengalami peningkatan maka belanja negara harus mengalami penurunan, sebaliknya ketika pajak berkurang maka belanja negara meningkat.

Kebijakan fiskal adalah peraturan yang mempengaruhi APBN. Kebijakan fiskal bersama kebijakan moneter sangat penting untuk mengcrosscheck kembali kendala dari siklus ekonomi. Pada proses sistem ekonomi kapitalis mengalami kendala saat berjalannya mekanisme pasar, perlu untuk mengevaluasi berbagai bisnis jalannya ekonomi, bahwa mekanisme pasar berjalan dengan sempurna.

Pada pendapatan pemerintah, pemerintah sudah menargetkan pendapatan pajak yang sesuai. Sri Mulyani menjelaskan bahwa dari tahun sebelumnya berada di situasi target pendapatan lebih tinggi, sedangkan implementasinya lebih rendah. Pada tahun 2023 kebijakan perpajakan berfokus kepada beberapa peraturan *Pertama*, menjangkau basis dan meningkatkan rasio perpajakan melalui ekstensifikasi dan penggalan potensi, mengoptimalkan pendapatan pajak untuk ekonomi digital, serta melanjutkan terlaksananya Program Pengungkapan Sukarela (PPS). *Kedua*, mengoptimalkan proses administrasi, meningkatkan ketaatan masyarakat, dan pembaharuan regulasi. *Ketiga*,

memberikan insentif perpajakan yang sesuai dengan cara tetap menjaga efektivitas kegiatan ekonomi strategis yang menghasilkan *multiplier effect* sangat besar. Sedangkan dalam ekonomi Islam, pendapatan negara antara masyarakat Muslim dan Non Muslim dipisahkan beberapa golongan, yaitu Masyarakat Muslim dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat, sedangkan Non Muslim dikenakan pajak berupa Jizyah dan kharaj untuk pertanian atau perkebunan dan pajak atas bea cukai.

Jika dilihat dari segi pengeluaran tentunya adanya tingkat kualitas yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dijadikan sebagai prioritas, karena saat ini pun pemerintah daerah ikut serta dalam melakukan dorongan pembangunan. Yang dimana terkait biaya yang dikeluarkan didapat dari pusat yang diturunkan langsung ke daerah yang menjadi tempat pembangunan. Bersumber dari adanya kebijakan fiskal yang diatur dalam APBN 2023 disini pemerintah fokus melakukan tingkat produktivitas guna transformasi ekonomi menyeluruh dan berkesinambungan dalam kebijakannya. Pemerintah berupaya untuk memaksimalkan APBN guna menjaga nilai ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian yang cukup tinggi. Hal tersebut tentu saja berbeda jika dilihat dalam pandangan islam, prinsip pemisahan antara pengeluaran yang bersumber dari pendapatan yang berbeda sangatlah penting karena dalam prinsip ini harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pada agama islam, yakni penggunaan anggaran yang bersumber dari hal tertentu seperti zakat, shadaqah, ghanimah, dan fay"i. Dalam pengeluaran zakat tentu harus sesuai dengan ketentuan Al - Qur'an Surah At - Taubah Ayat 60 bahwa pengeluarannya hanya diperuntukkan untuk membantu delapan kelompok yang dimana terdapat fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf, budak yang ingin memerdekakan dirinya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan musafir. Hal tersebut bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian mereka. Sedangkan jika dalam pengeluaran lain, pengeluaran yang digunakan untuk kebutuhan negara ini fokus dalam segi keamanan, kesehatan, dan pendidikan.

Kebijakan moneter dirasa juga memiliki peranan penting, karena kebijakan fiskal harus bisa seimbang dengan moneter. Kebijakan moneter lebih kearah dalam mengurus dan melindungi stabilitas ekonomi, karena suatu bentuk upaya dari stabilitas uang beredar supaya tidak berlebihan, menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak meningkat, dan pembangunan ekonomi yang stabil ialah dengan melindungi stabilitas moneter. Di dalam kebijakan ini tentunya menggunakan sistem bunga, hal tersebut tentu dirasa bertolak belakang dengan ajaran agama islam. Jika dalam konvensional menggunakan suku bunga, di dalam syariah menggunakan sistem bagi hasil. Jadi, dalam islam adanya kebijakan moneter ini bisa dilakukan yakni dengan menyesuaikan sesuai dengan syariat agama islam, karena tujuannya untuk meningkatkan perekonomian, mensejahterakan dan menguntungkan ekonomi masyarakat maupun pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam hal ini, kebijakan moneter menurut syariah memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia tentu dengan bantuan pemerintah utamanya.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan library research terhadap beberapa sumber literatur dapat disimpulkan bahwa Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi kebijakan makro ekonomi. Pada kebijakan fiskal Indonesia dalam pengelolaan APBN termasuk ke dalam defisit primer. Pemerintah mengambil langkah untuk melakukan pembiayaan anggaran guna mengimbangi pengeluaran pemerintah. Selain itu dari sisi pendapatan pemerintah meningkatkan rasio perpajakan melalui ekstensifikasi dan penggalan potensi, optimalisasi penerimaan pajak ekonomi digital, penguatan administrasi, kepatuhan dan penyempurnaan regulasi. Serta memberikan insentif perpajakan yang terarah dan terukur dengan cara menjaga efektivitas kegiatan ekonomi yang menghasilkan multiplier effect yang besar sesuai ekonomi Islam. Dari sisi pengeluaran pemerintah meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi Islam. Sedangkan pada kebijakan moneter dalam perannya sangat penting untuk mengatur dan menjaga stabilitas perekonomian. Namun dalam sistem moneter ini, menggunakan alat pengatur suku bunga dalam peredaran uang kepada masyarakat. Padahal dalam Islam tidak mengenal suku bunga sehingga kebijakan moneter ini tidak berlaku pada perekonomian Indonesia menurut ekonomi Islam.

Dari pembahasan di atas, pemerintah telah merencanakan, menganalisis, menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Islam. Pemerintah tetap mengoptimalkan kebijakan pada pendapatan pajak yang sesuai dengan ekonomi Islam seperti Masyarakat muslim mengeluarkan zakat dan non muslim mengeluarkan jizyah dan kharaj dibidang pertanian atau Perkebunan dan pajak atas beacukai. Mengenai kebijakan zakat dalam hal ini salah satunya adalah zakat produktif berupa modal dan pendidikan fakir miskin untuk mengoptimalkan dana zakat sesuai dengan visi dan misi Lembaga Amil Zakat.

5. Daftar Pustaka

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), 43–50. <https://doi.org/10.32694/010760>
- Anwar, K. (2014). Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro Indonesia (Tahun 1993-2007). *Jejaring Administrasi Publik*, 6(2), 588–603.
- Dwihapsari, R., Kurniawati, M. R., & Huda, N. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Konvensional dan Syariah Terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2013-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2368>
- Hadi, S. S. (2017). Kebijakan Moneter dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia Secara Global. *Jurnal Moneter*, IV(1), 91–98.
- Haksanggulawan, A., Hajar, I., & Putera, A. (2023). Neraca Neraca. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari*, 1(2), 401–407.

<https://doi.org/10.572349/neraca.v1i2.163%0Ahttps://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/163>

- Handayani, T., & Huda, N. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2759–2772. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8824>
- Humairah, F. (2023). Kebijakan Fiskal Dalam Islam Sebagai Solusi Ketidakadilan Distribusi. *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*, 1–13. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIBES/article/view/2519%0Ahttps://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIBES/article/download/2519/1292>
- Irawan, E., Maras, J. O., Hulu, M., & Sumbawa, K. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE)*, 2(2), 1–08. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v2i2.1898>
- Kementerian Keuangan. (2023). Informasi APBN 2023 Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. *Media Kementian Keuangan*, 1–23. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf>
- Muchlis, B. A., & Wahyudi, A. (2023). Kebijakan Fiskal dan Anggaran dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4), 779–799. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/20721>
- Mujasmara, F. D., Panggabean, R. T. T., Muliana, R. S., Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2986–2997. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6369>
- Okri Handoko, D., Putra, P. A., Ismail, R., & Soemitra, A. (2023). Bauran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 12–20. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).12616](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12616)
- Pranika, R., Fahrozi, A., Mahfud, A. H., & Noviarita, H. (2023). *Kebijakan Fiskal Dalam Prespektif Ekonomi Syariah* (pp. 17–24).
- Purwanto, H. (2017). Kebijakan Pengendalian Moneter di Indonesia dalam Perspektif Perbankan Syari'ah. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(01), 103–118. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1146>
- Putri, I. A., & Nasution, E. O. A. (2022). Kebijakan Moneter Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Perepektif Ekonomi Islam. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 166. <https://doi.org/10.30821/se.v8i1.13778>
- SP, M. E., & FALIHAN, S. (2022). Studi Literatur Bauran Kebijakan Moneter Dan Fiskal Terhadap Perekonomian: Perspektif Syariah. *MAPAN: Jurnal Manajemen ...*, 3(1), 72–82.
- Sukmana, E. T., & Kurniawan, R. (2021). *Teori Fiskal dan Moneter dalam Islam*.
- Supangat, S. (2013). Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 91–106. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.781>

Tri Inda Fadhila, N. (2021). Analisis Ekonomi Islam dalam Kebijakan Fiskal (APBN 2021) di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8692–8702.

Turmudi, I. (n.d.). Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Islam .